

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG**

**Oleh:**

**Heni Sukma Ningrum**

**Email: [henisukmaningrum@gmail.com](mailto:henisukmaningrum@gmail.com)**

**Wijayanto, S.IP, M.Si, Ph.D**

**Email: [wijayanto@live.undip.ac.id](mailto:wijayanto@live.undip.ac.id)**

**Drs. Ahmad Taufiq, M.Si**

**Email: [ahmadtaufiqimron@gmail.com](mailto:ahmadtaufiqimron@gmail.com)**

## **Abstrak**

Kartu Prakerja merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berbasis pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Antusiasme masyarakat terhadap Kartu Prakerja sangat tinggi mengingat Tahun 2020 banyak masyarakat yang terdampak Covid-19. Namun pada pelaksanaannya, banyak keluhan yang muncul di masyarakat karena kesulitan mendaftar hingga merasa kesal karena tidak lolos setelah beberapa kali mendaftar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala Disnaker Kota Semarang dalam implementasi program kartu prakerja di Kota Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang suatu variabel, berupa lisan dari narasumber dan situasi yang dapat diamati. Hasil penelitian, implementasi kebijakan kartu prakerja yang dilaksanakan di Kota Semarang oleh Disnaker Kota Semarang telah berjalan dengan baik seperti sosialisasi kepada masyarakat Semarang baik secara langsung maupun melalui social media, tersedianya perangkat kerja dan sarana prasarana yang menunjang dalam pendampingan masyarakat terkait kartu prakerja, sikap jujur pegawai dalam melayani masyarakat Semarang, serta adanya pembagian kerja dan SOP yang jelas. Keberhasilan program ini juga terbukti karena telah membantu dalam meningkatkan kompetensi dan memperbaiki perekonomian hidup para penerima manfaat kartu prakerja.

*Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kartu Prakerja*

## Abstract

*The Pre-Employment Card is a policy issued by the government based on the development of work competencies aimed at job seekers, workers/labourers who have been laid off, and/or workers/laborers who need competency improvement. Public enthusiasm for the Pre-Employment Card is very high considering that in 2020 many people are affected by Covid-19. However, in its implementation, many complaints arose in the community due to difficulties in registering to the point of feeling annoyed because they did not pass after registering several times. This study aims to determine the success and constraints of the Semarang City Manpower Office in implementing the pre-employment card program in Semarang City. The research uses a qualitative descriptive approach that describes a variable, in the form of verbal statements from sources and observable situations. The results of the study, the implementation of the pre-employment card policy implemented in Semarang City by the Semarang City Manpower Office has gone well such as socialization to the Semarang community both directly and through social media, the availability of work tools and infrastructure that support community assistance related to pre-employment cards, honest attitude employees in serving the people of Semarang, as well as a clear division of labor and SOPs. The success of this program is also proven because it has helped in increasing the competence and improving the livelihoods of the beneficiaries of the pre-employment card.*

*Keywords: Implementation, Policy, Pre-Employment Card*

### I. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara yang belum bisa dikatakan sejahtera. Banyak masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial masih belum terselesaikan dari dulu hingga sekarang. Hal tersebut menimbulkan pemikiran bahwa masih diperlukan kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih efektif. Kebijakan tersebut harus bersifat terbuka bagi seluruh kalangan masyarakat tanpa melihat status sosial ekonomi, agama, ras, suku bangsa, usia, dan

jenis kelamin. Sehingga semua masyarakat dapat memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Faktor lain yang memicu rendahnya kesejahteraan masyarakat di Indonesia yaitu masalah pengangguran. Pengangguran tersebut terjadi karena ketidakseimbangan dan ketidakcocokan antara permintaan lapangan kerja dengan penawaran lapangan kerja (Soleh, 2017). Selain kelebihan tenaga kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat juga menjadi alasan terjadinya pengangguran. Pasalnya lapangan

pekerjaan yang tersedia hanya dapat diisi oleh beberapa orang saja. Oleh karena itu, memiliki pekerjaan yang layak masih belum dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Terlebih lagi semenjak masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Alih-alih mencegah penyebaran penyakit, kebijakan tersebut justru menimbulkan dampak yang besar pada sektor perekonomian. Akibatnya, banyak perusahaan yang mengalami kerugian yang kemudian harus melakukan tindakan seperti pengurangan upah kerja bahkan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya.

Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 1,84 persen per Agustus 2020. Di Kota Semarang sendiri tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 4,54 persen menjadi 9,57 persen di tahun 2020.

Dalam merespon keluhan masyarakat, pemerintah memberikan berbagai macam bantuan yang dapat dirasakan selama

pandemi ini belum berakhir, salah satunya yaitu program Kartu Prakerja yang diresmikan melalui Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja,

Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan kepada pencari kerja, pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja, atau pekerja yang memerlukan kompetensi tambahan. Pada program tersebut, masyarakat mendapatkan dua hak yakni pelatihan online yang dapat diakses untuk meningkatkan kapabilitas diri yang dapat disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing, serta bantuan dana yang dapat digunakan untuk keperluan lain.

Apabila dilihat secara teknis, prosedur yang dilakukan mulai dari pendaftaran hingga dilakukannya pelatihan tergolong mudah karena dilakukan secara online sehingga dapat dilakukan dimana saja. Namun, bagi sebagian orang menganggap prosedur yang dilakukan berbelit-belit terutama bagi sektor informal yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi. Pada kenyataannya, diluar sana memang masih banyak masyarakat yang memiliki antusias yang besar untuk mengikut program Kartu Prakerja, namun karena terhambat oleh

keterbatasan teknologi masyarakat menjadi tidak bisa mengakses program tersebut. Bahkan tak jarang masyarakat awam yang kurang mengetahui berlangsungnya program ini.

Bukan hanya itu, masyarakat yang telah mendaftar Kartu Prakerja pun mengeluhkan ketidaklolosannya yang terjadi berulang kali padahal syarat yang diperlukan sudah dipenuhi. Hal tersebut kemudian menyebabkan masyarakat mempertanyakan bagaimana sebenarnya alur seleksi yang dilakukan dalam program tersebut.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang sedang berlangsung.

Hasil penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari kegiatan observasi di lapangan dan wawancara terhadap informan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen seperti buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan focus penelitian.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

Kartu Prakerja merupakan program pemerintah mengenai pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang mengalami PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program ini merupakan kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta yang didesain sedemikian rupa untuk memberikan nilai kepada pengguna dan juga memberikan nilai kepada sektor swasta. Program Kartu Prakerja tersebut diresmikan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra-Kerja.

Sesuai PP No.36 Tahun 2020 pasal 28 ayat 1 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam bentuk: a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja; b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah; c. penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah; dan d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja.

Pemerintah daerah dalam penelitian ini yakni Disnaker Kota Semarang sejauh ini sudah memberikan dukungan dengan membantu

masyarakat Semarang yang kesulitan mendaftar Kartu Prakerja. Pendaftaran yang dilakukan oleh Disnaker Kota Semarang dilakukan secara *online* menggunakan fasilitas komputer dan jaringan yang ada di Kantor Disnaker Kota Semarang dan masyarakat hanya perlu datang dan membawa KTP.

### **A. Komunikasi**

Komunikasi berbicara tentang bagaimana suatu kebijakan dapat dikomunikasikan dan dipahami oleh pelaksana dan masyarakat. Disnaker Kota Semarang mengungkapkan sosialisasi program Kartu Prakerja belum matang saat program tersebut diluncurkan. Kurangnya sosialisasi dari pusat ke daerah membuat pemerintah daerah dalam hal ini Disnaker Kota Semarang mau tak mau harus mempelajari lebih dalam secara mandiri terkait program Kartu Prakerja tersebut yang hingga kemudian mampu membantu masyarakat Semarang

Disnaker Kota Semarang juga memberikan upayanya dalam membagikan informasi terkait program Kartu Prakerja melalui social media yang dimilikinya. Hal tersebut menjadi bagian dari sosialisasi khususnya untuk masyarakat Semarang yang akrab dengan social media instagram. Apabila terdapat pertanyaan yang ditanyakan oleh

masyarakat melalui komentar maka akan langsung dijawab oleh admin pengelola akun instagram tersebut.

### **B. Sumberdaya**

Keberhasilan suatu kebijakan juga didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari segi sarana dan prasarana, anggaran, maupun pelaksanaannya. Dari hasil observasi, dukungan sumber daya dalam implementasi kartu prakerja di Semarang, antara lain ketersediaan pegawai/staff, serta tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelayanan pendaftaran Kartu Prakerja. Dari segi SDM baik secara kuantitas maupun kualitas cukup memadai meskipun hanya ada beberapa staff yang memahami tentang program kartu prakerja, namun hal tersebut tidak menghalangi Disnaker Kota Semarang untuk tetap membantu masyarakat Semarang yang kesulitan untuk mendaftar kartu prakerja.

Sumber daya anggaran pada program kartu prakerja sendiri setiap tahunnya berubah-ubah tergantung berapa target kuota yang ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (PMO). Pada tahun 2020 kartu prakerja memiliki anggaran sejumlah 20 triliun rupiah, sementara anggaran di tahun 2021 adalah 21,2 triliun rupiah.

Mengacu pada Perpres No. 36 Tahun 2020 pasal 12, penyaluran dana kartu prakerja digunakan untuk membayar biaya pelatihan, insentif biaya mencari kerja, dan insentif mengisi survey dan evaluasi. Total dana yang akan didapat oleh penerima manfaat Kartu Prakerja yaitu sejumlah Rp3,55 juta dengan rincian Rp 1 juta untuk pembelian pelatihan, Rp 2,4 juta sebagai insentif biaya mencari kerja yang diberikan bertahap sejumlah Rp 600 ribu selama 4 bulan, dan Rp 150 ribu sebagai insentif telah mengisi survei evaluasi.

Penyaluran dana tersebut dilakukan langsung oleh pusat kepada penerima manfaat sehingga Dinas Tenaga Kerja tidak memperoleh bagian dari anggaran tersebut.

### **C. Disposisi**

Disposisi pada implementasi kebijakan mengartikan bahwa pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan kartu prakerja di Semarang sendiri telah berjalan dengan baik didukung oleh sikap para staff Disnaker Kota Semarang yang memberikan kontribusi dalam mensukseskan kebijakan kartu prakerja yang dilandasi dengan komitmen dan kejujuran. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Staff Disnaker yang mengatakan

dengan jujur kepada masyarakat bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran kartu prakerja yang dilakukan di Disnaker Kota Semarang.

### **D. Struktur Kelembagaan**

Berbicara tentang struktur birokrasi atau struktur kelembagaan berarti membicarakan aspek-aspek yang ada dalam struktur birokrasi yang terdiri dari adanya *Standard Operating Procedur* (SOP) dan pembagian kerja.

Struktur birokrasi dalam implementasi kartu prakerja di Semarang telah berjalan dengan baik karena terdapat pembagian kerja yang ditugaskan kepada perangkat kerja untuk mendampingi masyarakat Semarang ketika hendak melakukan pendaftaran kartu prakerja.

Hal tersebut didukung dengan adanya posko di Disnaker Kota Semarang, tersedianya pengantar kerja yang membantu pelayanan akses pada calon pendaftar, serta kemudahan akses dan pendampingan pada disabilitas sebagaimana yang diarahkan oleh Kepala Disnakertrans Jateng. Selain itu, pihak Disnaker Kota Semarang dalam pendampingan masyarakat juga menaati aturan sesuai SOP yang mengacu pada Mekanisme pendaftaran Kartu Pra Kerja di

Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten. Hal tersebut dibuktikan saat masyarakat mendatangi kantor Disnaker Kota Semarang, baik staff maupun masyarakat diwajibkan menaati protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 pada saat pendampingan terkait pendaftaran Kartu Prakerja

### **E. Kendala-Kendala Yang Ditemui**

Dalam suatu implementasi kebijakan, tak jarang ditemukan beberapa kendala yang menghambat jalannya kebijakan.

*Pertama*, persyaratan administrasi menjadi salah satu permasalahan yang sering ditemui oleh masyarakat pada saat membuat akun Kartu Prakerja. Syarat administrasi yang dimaksud adalah data yang ada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pasalnya, masyarakat Kota Semarang seringkali tidak mengetahui bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya belum diperbarui dari pihak dispendukcapil. Namun karena permasalahan tersebut bukan merupakan ranah Disnaker maka pihaknya seringkali mengusulkan masyarakat untuk mengurusnya sendiri ke Disdukcapil.

*Kedua*, tersebarnya tautan yang mengatasnamakan Kartu Prakerja yang pada kenyataannya tautan tersebut bukan mengarah ke laman resmi Kartu Prakerja

melainkan hanya tiruan yang mengecoh masyarakat awam. Ketidaktelitian masyarakat akan hal tersebut membuat mereka tanpa sadar mengisi data pribadi pada tautan palsu tersebut. Data pribadi yang terlanjur diisikan pada tautan palsu tersebut kemudian bisa disalahgunakan oleh oknum tertentu. Dampaknya, masyarakat yang data pribadinya telah disalahgunakan menjadi kesusahan saat akan mendaftar Kartu Prakerja secara resmi.

Ketiga, kendala teknologi dan jaringan yang sering ditemukan oleh masyarakat yang masih gaptek. Seperti yang kita ketahui kartu Prakerja merupakan program dari pemerintah yang berbasis pelatihan kompetensi dan dilakukan secara daring. Mulai dari pendaftaran akun hingga pelaksanaan pelatihan dilakukan secara daring melalui laman [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id). Hal tersebut menjadi suatu kendala bagi sebagian masyarakat Kota Semarang yang belum dapat mengakses jaringan internet.

### **F. Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Semarang**

Program Kartu Prakerja mendapatkan respon positif dari masyarakat Kota Semarang mengingat pada tahun 2020, masyarakat Kota Semarang banyak yang kehilangan

pekerjaan dan pengurangan pendapatan sebagai dampak dari pandemic Covid-19. Menurut laporan manajemen pelaksana program Kartu Prakerja tahun 2020 tercatat ada sebanyak 38 ribu penerima manfaat yang berdomisili di Kota Semarang yang dimana menjadi kota dengan jumlah penerima manfaat kartu prakerja terbanyak dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah. Selain itu banyak masyarakat Semarang yang mengaku terbantu perekonomiannya dengan adanya program Kartu Prakerja tersebut yang dimana para penerima manfaat dapat meningkatkan kompetensi diri berdasarkan pelatihan yang diambil. Selain itu juga dana insentif yang diperoleh dari Kartu Prakerja sangat membantu perekonomian mereka terlebih lagi bagi masyarakat Semarang yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Dana insentif yang didapat dari program Kartu Prakerja dapat mereka alokasikan sebagai modal usaha, memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk tabungan dan investasi tergantung pada pribadi masing-masing.

Meskipun dianggap mampu meringankan perekonomian mereka yang menerima manfaat, pelaksanaan Kartu Prakerja masih dianggap kurang tepat sasaran. Mengacu pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 terkait pembangunan

sumber daya manusia (SDM), BPK menyebutkan bahwa ada indikasi ketidaktepatan sasaran yang menjadi penerima bantuan Kartu Prakerja. Hal tersebut dikarenakan penerima bantuan Kartu Prakerja merupakan pekerja/buruh yang memiliki gaji lebih dari Rp3,5juta per bulan.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan paparan pembahasan dan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Disnaker Kota Semarang telah mendukung dalam memfasilitasi masyarakat Semarang terkait pendaftaran kartu prakerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 pasal 28 tentang Peran Pemerintah Daerah. Sosialisasi yang diberikan kurang mendalam terhadap perangkat kerja yang ditugaskan untuk mendampingi masyarakat, sehingga mengharuskan perangkat kerja untuk mempelajarinya secara mandiri.
2. Sumberdaya manusia pada Disnaker Semarang hanya terdapat <10 orang yang memahami program kartu prakerja, sehingga terlihat kalau Disnaker Semarang hanya mengandalkan orang-orang tertentu saja untuk menghadap masyarakat yang

membutuhkan bantuan terkait program kartu prakerja.

3. Anggaran yang dialokasikan untuk program kartu prakerja ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (PMO) yang dimana langsung diberikan kepada penerima manfaat tanpa melewati Disnaker terlebih dulu.

4. Pegawai Disnaker Kota Semarang menjunjung tinggi kejujuran sebagaimana yang diharuskan dalam mendukung efektivitas implementasi kartu prakerja di Kota Semarang yakni dengan tidak memungut biaya saat mendampingi masyarakat yang mendaftar kartu prakerja

5. Struktur birokrasi yang ada pada pelaksanaan program kartu prakerja sudah berjalan dengan lancar dengan adanya pembagian kerja terhadap pegawai Disnaker Kota Semarang yang ditugaskan untuk mendampingi masyarakat dan telah menaati protocol kesehatan sesuai yang ditetapkan dalam SOP.

6. Masih banyaknya keluhan masyarakat Semarang yang diterima oleh Disnaker antara lain yaitu data diri yang tidak sesuai KTP, penipuan melalui tautan palsu, serta kendala terhadap perangkat dan jaringan. Permasalahan data diri hanya dapat ditangani oleh Disdukcapil.

7. Program kartu prakerja masih dianggap kurang tepat sasaran oleh BPK namun disisi lain juga terbukti membantu masyarakat Semarang baik dalam hal meningkatkan kompetensi serta meningkatkan perekonomian masyarakat melalui dana insentif yang diberikan

### **Saran**

Berdasarkan paparan pembahasan dan hasil penelitian diatas, maka peneliti bermaksud memberikan saran sebagai berikut:

1. Disnaker Kota Semarang diharapkan untuk tetap gencar memberikan sosialisasi baik secara langsung dan tidak langsung untuk menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang juga bertujuan untuk memperbaiki perekonomian di Kota Semarang. Sosialisais bisa dilakukan dengan menambah kelompok sasaran seperti grup PKK, karang taruna, dan masih banyak lagi.

2. Disnaker Kota Semarang diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM terutama pemahaman program kartu prakerja agar masyarakat tidak ragu bertanya mengenai permasalahan terkait kartu prakerja ke Disnaker. Sehingga, seluruh pegawai Disnaker nantinya dapat membantu menjawab permasalahan yang ditanyakan

oleh masyarakat tanpa harus mengandalkan orang-orang tertentu saja.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistika Kota Semarang

Perwal No 69 Tahun 2016 Kota Semarang

Agustino Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).

Consuello, Y. (2020). Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19. 'ADALAH, 4(1).

Fathin, Audori, et al. (2020). Pekerja Informal di Tengah Pandemi Covid-19.

Firnanda, A., Fitri, C., & Ardianto, F. (2021). Evaluasi Program Kartu Prakerja Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan Dan Aksesibilitas. Jurnal Hukum Magnum Opus, 4(2), 170-180.

Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta : Gaava Media

Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. JRP (Jurnal Review Politik), 6(2), 195-224..

Kasmad, Rulinawaty. (2018). Implementasi Kebijakan Publik.

Maftuchan, A. (2020). Policy Brief 21-Program Tunai di Era COVID-19: Bantuan Tunai Korona atau Jaminan Penghasilan Semesta.

Maulinda, T.mulya .(2019). IMPLEMENTASIPASAL 34 AYAT 1 UUD 1945 TENTANG FAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK YANG TERLANTAR DIPELIHARA OLEH NEGARA (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH). Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

Moleong, Lexy J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja. Rosdakarya

Nadeak, B. (2019). Buku Materi Pembelajaran Manajemen Pelatihan dan Pengembangan.

Pratama, Y. C. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 4(2).

Predianto, T., & Khoirurrosyidin, K. (2020). Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19. Gorontalo Journal of Government and Political Studies, 3(2), 115-127.

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia. Gave Media.

Riant, N. (2014). Metode Penelitian Kebijakan. Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Ridwan, S. H. (2020). Analisis Potensi Maladministrasi Dalam Kebijakan Program Kartu Prakerja.

Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81-95.

Siregar, A. P., & Oktaviana, N. (2020). Realokasi Kartu Pra Kerja Dalam Mendukung Intensifikasi Sektor Pertanian.

Agrisaintifika: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, 4(1), 1-13.

Subarsono, AG. (2005). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, Dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sukmana, O., Kurniawan, L. J., Masduki, M., & Abdussalam, A. (2015). Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial. Intrans Publishing.

Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). Jurnal Sospol, 2(1), 103-122.

Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 6(2), 98-102.

Tahir, A. (2014). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerbit Alfabeta.

Triwibowo, Darmawan; & Bahagijo, Sugeng. 2006. Mimpi Negar Kesejahteraan. Jakarta: LP3ES.

Wijayanti, R. I., & Humardhiana, A. (2020). Optimalisasi Program Kartu Prakerja Dengan Pelatihan Branding Strategy. Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 109-122.

Winarno, B. (2007). Kebijakan publik: Teori dan proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

Yana, S. D. (2021). Efektivitas Program Kartu Prakerja dalam Membangun Sumberdaya Manusia. Jurnal Investasi Islam, 6(1), 12-21

